

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Reformasi keuangan daerah telah melahirkan berbagai kebijakan yang mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Salah satu kebijakan yang menyertai reformasi keuangan daerah adalah lahirnya otonomi daerah yang ditandai dengan munculnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004). Tujuan dari adanya otonomi daerah ini adalah agar tidak terjadi pemusatan dalam kekuasaan pemerintahan pada tingkat pusat sehingga jalannya pemerintahan dan pembangunan berjalan lancar.

Salah satu ciri utama daerah mampu melaksanakan otonomi daerah adalah pada kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya dengan tingkat proporsi ketergantungan kepada pemerintah pusat yang semakin mengecil dan diharapkan bahwa pendapatan asli daerah harus menjadi bagian terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan roda pemerintahan suatu daerah yang berdasar pada prinsip otonomi yang nyata, luas, dan bertanggungjawab. Peranan pendapatan asli daerah dalam keuangan daerah menjadi salah satu tolak ukur penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam arti semakin besar suatu daerah memperoleh dan menghimpun PAD maka akan semakin besar pula tersedia jumlah dana daerah yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah (Harefa, *et.al.*, 2017).

Pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya terfokus kepada dana bantuan dari pusat dalam bentuk dana perimbangan saja. Lebih penting dari itu adalah daerah yang dapat mandiri untuk mengurus rumah tangganya sendiri termasuk kemandirian keuangan daerah dengan memanfaatkan dan mendayagunakan, serta mengelola potensi-potensi yang ada di daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan pembangunan daerah. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah berarti kemampuan pemerintah yang dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri dalam rangka asas desentralisasi.

Menurut Halim dan Kusufi (2013), kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari transfer pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah

yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan yang dianggarkan dapat menjadikan kemandirian keuangan suatu daerah menjadi semakin membaik. Hal ini dikarenakan adanya kemampuan suatu daerah dalam menggali pendapatan asli di daerahnya yang otomatis akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Jadi, semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka akan semakin kecil pula ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat.

Penelitian mengenai tingkat kemandirian keuangan daerah telah banyak dilakukan oleh para peneliti di daerah yang berbeda-beda. Penelitian Erawati dan Suzan (2015), menunjukkan hasil uji parsial keempat komponen PAD menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Sedangkan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Penelitian yang dilakukan Mulatsih (2015), menunjukkan bahwa secara simultan ada pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah terhadap kemandirian keuangan daerah.

Penelitian yang dilakukan Sintia (2017), menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2014. Terdapat hubungan yang sedang dan bersifat positif artinya, setiap kenaikan PAD maka hal tersebut akan meningkatkan kemandirian keuangan daerah dan begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan penelitian sebelumnya tidak semua pemerintah daerah di Indonesia berhasil mencapai tingkat kemandirian keuangan yang diharapkan. Masih banyak pemerintah kabupaten/kota di daerah yang sangat bergantung kepada dana perimbangan dari pemerintah pusat. Kabupaten Bangka merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebagai kabupaten yang sedang berkembang, pemerintah daerah kabupaten Bangka dituntut untuk mengelola sumber pendapatan daerahnya dengan semaksimal mungkin untuk membiayai kegiatan pemerintahannya. Pengelolaan keuangan yang baik salah satunya dengan adanya pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dianggarkan dengan peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya.

Dikutip dari situs resmi Bank Indonesia (<http://www.bi.go.id/>) pada tanggal 28 November 2018, dalam beberapa tahun terakhir realisasi pendapatan daerah di kabupaten Bangka mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016, realisasi pendapatan di Kabupaten Bangka sebesar 87,81% dari keseluruhan target

pendapatan tahun 2016. Nilai realisasi tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun sebelumnya yaitu tahun 2015 yang mencapai 101,60%. Di tahun 2017, realisasi pendapatan daerah sampai dengan triwulan ketiga adalah sebesar 74,02% dari keseluruhan target pendapatan tahun 2017. Nilai realisasi tersebut sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada periode sebelumnya yang hanya mencapai 65,17%. Berdasarkan data realisasi pendapatan pada tahun 2017, dana perimbangan masih menjadi kontributor terbesar pada pendapatan daerah di kabupaten Bangka dengan pangsa pasar sebesar 76,96%. Hal ini mencerminkan masih besarnya ketergantungan pemerintah kabupaten Bangka terhadap anggaran dana perimbangan dari pusat.

Berdasarkan uraian fenomena tersebut serta penelitian-penelitian yang telah dilakukan terdahulu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2014-2018”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Apakah pajak daerah berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pemerintah kabupaten Bangka pada tahun 2014-2018 ?
- b. Apakah retribusi daerah berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pemerintah kabupaten Bangka pada tahun 2014-2018 ?

- c. Apakah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pemerintah kabupaten Bangka pada tahun 2014-2018 ?
- d. Apakah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pemerintah kabupaten Bangka pada tahun 2014-2018 ?

### **1.3. Batasan Masalah**

Penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya agar penelitian ini tidak menyimpang dan dapat dilakukan secara terarah. Oleh sebab itu, penulis membatasi masalah hanya yang berkaitan dengan “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2014-2018”. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini terdiri atas 4 (empat) variabel yang akan diteliti yaitu, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan jawaban atau sasaran yang ingin dicapai penulis dalam sebuah penelitian. Berdasarkan dari rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menguji pengaruh pajak daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pemerintah kabupaten Bangka pada tahun 2014-2018.

- b. Untuk menguji pengaruh retribusi daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pemerintah kabupaten Bangka pada tahun 2014-2018.
- c. Untuk menguji pengaruh hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pemerintah kabupaten Bangka pada tahun 2014-2018.
- d. Untuk menguji pengaruh lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pemerintah kabupaten Bangka pada tahun 2014-2018.

### **1.5. Kontribusi Penelitian**

Penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut :

1. Kontribusi Teoritis
  - a. Sebagai sarana pemikiran dalam rangka memperkaya dan mengembangkan ilmu akuntansi, terutama dalam bidang akuntansi sektor publik mengenai kemandirian keuangan daerah .
  - b. Diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan literatur bagi peneliti-peneliti selanjutnya dimasa mendatang, baik penelitian sejenis maupun pengembangannya.
2. Kontribusi Praktis
  - a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan media untuk belajar memecahkan masalah secara ilmiah dan memberikan pengalaman belajar serta tambahan wawasan tentang bagaimana ruang lingkup dari pemerintahan khususnya

mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

- b. Dapat memberikan referensi atau sumbangan pemikiran untuk pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna meningkatkan kemandirian keuangan daerahnya.
- c. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka untuk senantiasa mengelola sumber pendapatan daerahnya dengan semaksimal mungkin untuk membiayai kegiatan pemerintahannya guna tercapainya tujuan otonomi daerah.

### 3. Kontribusi Kebijakan

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan mengenai pendapatan daerah yang ada di wilayah Kabupaten Bangka.

#### **1.6. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran peneliti yang lebih jelas dan sistematis agar mempermudah bagi pembaca dalam memahami penulisan penelitian ini. Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari:



## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang yang menjadi topik penelitian, perumusan masalah, batasan masalah, dan diuraikan tujuan serta manfaat penelitian, kemudian diakhiri dengan sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan mengenai teori dan pendapat para ahli yang dipakai dalam analisis penelitian ini. Setelah itu diuraikan dan digambarkan dalam kerangka pemikiran.

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini berisi penjelasan mengenai tempat dan waktu penelitian, pendekatan penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, definisi dan pengukuran penelitian, teknik analisis data.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini akan menjelaskan tentang analisis serta pembahasan data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data yang telah diolah dan menjelaskan bagaimana data yang telah diolah dan dianalisis serta diinterpretasikan.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran yang sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.